

Disaster-Responsive Governance dan Kompetensi Guru dalam Membangun Resiliensi Pendidikan pada Pendidikan Islam Pascabencana Banjir

Alfian Sani^{1*}

¹Institut Agama Islam Negeri Langsa, Indonesia

E-mail: 1*alfiansani@iainlangsa.ac.id

*E-mail Corresponding Author: alfiansani@iainlangsa.ac.id

Abstrak

Bencana banjir merupakan salah satu ancaman yang paling sering mengganggu keberlangsungan masyarakat di Indonesia. Dampaknya tidak hanya berupa kerusakan infrastruktur sekolah, tetapi juga menurunkan kualitas layanan masyarakat, menghambat proses pembelajaran, serta melemahkan ketahanan institusi masyarakat dalam menghadapi situasi krisis. Dalam konteks masyarakat Islam, tantangan tersebut menjadi semakin kompleks karena guru tidak hanya bertugas mempertahankan keberlangsungan pembelajaran, tetapi juga menjalankan fungsi pembinaan karakter, pendampingan psikososial, dan penguatan nilai-nilai spiritual peserta didik. Penelitian ini bertujuan menganalisis hubungan antara Disaster-Responsive Governance dan kompetensi guru dalam membangun resiliensi masyarakat pada satuan masyarakat Islam pascabencana banjir. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus pada wilayah terdampak banjir di Kabupaten Aceh Tamiang. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, serta analisis dokumen kebijakan dan laporan penanggulangan bencana masyarakat. Analisis data dilakukan menggunakan asyraf analisis tematik melalui proses reduksi data, kategorisasi, interpretasi, dan penarikan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rendahnya resiliensi masyarakat tidak semata-mata disebabkan oleh besarnya dampak bencana, tetapi juga dipengaruhi oleh lemahnya tata masyarakat masyarakat bencana, keterbatasan koordinasi antar pemangku kepentingan, serta belum optimalnya kompetensi adaptif guru dalam menghadapi situasi darurat. Guru dituntut menjalankan peran yang lebih luas sebagai fasilitator pembelajaran adaptif, pendamping psikososial, mediator komunikasi dengan masyarakat, sekaligus penguat nilai-nilai keislaman dalam proses pemulihan masyarakat. Penelitian ini menawarkan model konseptual yang mengintegrasikan Disaster-Responsive Governance, kompetensi guru adaptif, dan masyarakat kontekstual sebagai fondasi dalam membangun resiliensi masyarakat pada satuan masyarakat Islam. Model tersebut diharapkan menjadi dasar pengembangan kebijakan masyarakat yang lebih adaptif, inklusif, dan berkelanjutan di wilayah rawan bencana.

Kata Kunci: *Disaster-Responsive Governance, Kompetensi Guru, Resiliensi Pendidikan, Pendidikan Islam, Bencana Banjir.*

Abstract

Floods are one of the most frequent threats to the continuity of the education system in Indonesia. Their impacts include not only damage to school infrastructure but also reduced quality of educational services, hampered learning processes, and weakened the resilience of educational institutions in facing crises. In the context of Islamic education, these challenges are increasingly complex because teachers are not only tasked with maintaining the continuity of learning but also carry out character development, psychosocial support, and strengthening students' spiritual values. This study aims to analyze the relationship between Disaster-Responsive Governance and teacher competency in building educational resilience in Islamic educational units after flood disasters. The study used a qualitative approach with a case study design in flood-affected areas in Aceh Tamiang Regency. Data were collected through in-depth interviews, field observations, and analysis of policy documents and reports on educational disaster management. Data analysis was conducted using thematic analysis techniques through data reduction, categorization, interpretation, and conclusion drawing. The research findings indicate that low educational resilience is not solely due to the magnitude of the disaster's impact, but is also influenced by weak disaster-responsive educational governance, limited coordination between stakeholders, and suboptimal teacher adaptive competencies in dealing with emergency situations. Teachers are required to play a broader role as facilitators of adaptive learning, psychosocial counselors, communication mediators with the community, and reinforcers of Islamic values in the educational

recovery process. This research offers a conceptual model that integrates Disaster-Responsive Governance, adaptive teacher competencies, and contextual factors as a foundation for building educational resilience in Islamic educational institutions. This model is expected to serve as the basis for developing more adaptive, inclusive, and sustainable educational policies in disaster-prone areas.

Keywords: *Disaster-Responsive Governance, Teacher Competence, Educational Resilience, Islamic Education, Flood Disaster.*

I. PENDAHULUAN

Perubahan iklim global telah meningkatkan frekuensi dan intensitas bencana hidrometeorologi di berbagai negara, termasuk Indonesia. Laporan United Nations Office for Disaster Risk Reduction (UNDRR) menunjukkan bahwa selama dua asyarak terakhir kejadian bencana yang dipicu oleh perubahan iklim mengalami peningkatan yang signifikan, dengan banjir menjadi salah satu jenis bencana yang paling sering terjadi di asyarak Asia Tenggara. Indonesia sebagai negara kepulauan dengan kondisi geografis, topografi, dan curah hujan yang tinggi merupakan salah satu negara dengan asyarak kerawanan banjir yang sangat besar. Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2024 lebih dari 60% kejadian bencana di Indonesia merupakan bencana hidrometeorologi, dengan banjir menempati urutan pertama dibandingkan jenis bencana lainnya. Kondisi tersebut mengakibatkan kerugian ekonomi yang besar, kerusakan infrastruktur masyarak, serta terganggunya berbagai sektor pelayanan dasar, termasuk sektor masyarak.

Sektor masyarak merupakan salah satu sektor yang paling rentan terhadap dampak bencana. Gangguan yang ditimbulkan tidak hanya berupa kerusakan bangunan sekolah, tetapi juga terhentinya aktivitas pembelajaran, hilangnya akses masyarak bagi peserta didik, menurunnya kualitas layanan masyarak, hingga munculnya masalah psikososial yang memengaruhi proses belajar. UNESCO (2023) menyatakan bahwa jutaan peserta didik di seluruh dunia kehilangan kesempatan belajar setiap tahunnya akibat bencana alam, sementara UNICEF (2024) menegaskan bahwa pemulihan asyarak pascabencana sering kali berlangsung lebih lambat dibandingkan pemulihan sektor lainnya karena memerlukan rehabilitasi fisik sekaligus pemulihan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia.

Fenomena tersebut juga terjadi di Indonesia, khususnya di Kabupaten Aceh Tamiang yang merupakan salah satu wilayah rawan banjir di Provinsi Aceh. Banjir besar yang melanda wilayah tersebut pada akhir tahun 2025 mengakibatkan

terganggunya aktivitas asyarak pada asyarak seluruh kecamatan terdampak. Berdasarkan data Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang, ratusan satuan asyarak mengalami kerusakan dengan asyarak kerusakan yang bervariasi sehingga proses pembelajaran harus dihentikan sementara dan asyarak sekolah melaksanakan pembelajaran darurat pada asyarak yang tidak memadai. Selain kerusakan fisik sekolah, akses menuju sekolah juga terputus akibat rusaknya jalan dan jembatan sehingga memperlambat proses pemulihan asyarak. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa dampak bencana terhadap asyarak tidak hanya dipengaruhi oleh besarnya kerusakan infrastruktur, tetapi juga oleh kemampuan tata asyarak asyarak dalam merespons situasi darurat secara cepat, terkoordinasi, dan adaptif.



Gambar 1. Guru dan asyarak membersihkan buku, meja, serta peralatan belajar yang tertutup lumpur pascabanjir di Kabupaten Aceh Tamiang.



Gambar 2. Ruang kelas SDN 1 Kuala Simpang dipenuhi lumpur dan perabot sekolah yang rusak akibat banjir.



Gambar 3. Halaman sekolah yang dipenuhi lumpur sehingga menghambat proses pembelajaran dan kegiatan sekolah.

Dalam konteks pendidikan Islam, dampak tersebut menjadi lebih kompleks. Madrasah dan sekolah berbasis Islam tidak hanya bertanggung jawab menyelenggarakan proses pembelajaran akademik, tetapi juga memiliki fungsi strategis dalam pembentukan karakter, penguatan nilai-nilai keagamaan, pembinaan akhlak, serta pendampingan psikososial peserta didik. Guru pendidikan Islam dituntut mampu mempertahankan keberlangsungan proses pembelajaran sekaligus memberikan dukungan moral dan spiritual kepada peserta didik yang mengalami trauma akibat bencana. Namun demikian, pada praktiknya sebagian besar guru belum memperoleh pelatihan khusus mengenai pembelajaran responsif bencana maupun pendampingan psikososial sehingga kemampuan adaptasi guru dalam situasi darurat masih sangat terbatas. Kondisi ini menunjukkan bahwa resiliensi pendidikan tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan sarana dan prasarana, tetapi juga dipengaruhi oleh kualitas tata kelola pendidikan serta kapasitas guru dalam menghadapi kondisi krisis.



Gambar 5. Aktivitas masyarakat di lokasi pengungsian pascabanjir di Aceh Tamiang

Berbagai penelitian sebelumnya telah membahas isu pendidikan pada situasi bencana dari berbagai perspektif. Shah et al. (2020) menekankan pentingnya kesiapsiagaan sekolah melalui

penerapan *School Disaster Management* yang terintegrasi dengan sistem pengurangan risiko bencana. Lassa et al. (2023) menjelaskan bahwa efektivitas tata kelola bencana sangat dipengaruhi oleh koordinasi kelembagaan, kapasitas organisasi, dan integrasi kebijakan lintas sektor. Sementara itu, Arif et al. (2025) menunjukkan bahwa kompetensi adaptif guru menjadi faktor penting dalam menjaga keberlangsungan pembelajaran pada situasi krisis. Penelitian lain yang dilakukan oleh Parrott et al. (2025) menegaskan bahwa guru memiliki peran yang tidak hanya bersifat pedagogis, tetapi juga sebagai penyedia dukungan psikososial bagi peserta didik selama proses pemulihan pascabencana. Di sisi lain, Roca-Campos et al. (2025) mengemukakan bahwa pendidikan inklusif masih menjadi tantangan utama dalam proses pemulihan pendidikan karena kelompok peserta didik berkebutuhan khusus sering kali belum memperoleh layanan pendidikan yang memadai.

Meskipun demikian, kajian-kajian tersebut masih menunjukkan beberapa keterbatasan. Sebagian besar penelitian hanya berfokus pada tata kelola pendidikan responsif bencana tanpa menghubungkannya dengan pengembangan kompetensi guru sebagai aktor utama dalam proses pembelajaran. Penelitian lain lebih banyak mengkaji kompetensi guru dari perspektif pedagogik dan profesional tanpa mengaitkannya dengan sistem tata kelola pendidikan pascabencana. Selain itu, penelitian mengenai educational resilience masih didominasi oleh pembahasan mengenai pemulihan infrastruktur sekolah dan belum banyak mengintegrasikan aspek tata kelola pendidikan, kompetensi guru, serta karakteristik pendidikan Islam dalam satu kerangka konseptual yang komprehensif. Dengan demikian, masih terdapat research gap mengenai bagaimana hubungan antara *Disaster-Responsive Governance* dan kompetensi guru dapat membentuk resiliensi pendidikan secara terpadu pada satuan pendidikan Islam pascabencana banjir.

Penelitian ini didasarkan pada beberapa perspektif teori yang saling melengkapi. Pertama, Disaster Management Theory menjelaskan bahwa keberhasilan penanggulangan bencana ditentukan oleh siklus mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan pemulihan yang dilakukan secara sistematis. Kedua, Disaster Risk Reduction (DRR) menekankan pentingnya integrasi pengurangan risiko bencana ke dalam kebijakan dan tata kelola pendidikan sehingga sekolah memiliki kapasitas untuk

mengantisipasi dan merespons bencana secara efektif. Ketiga, Resilience Theory memandang resiliensi sebagai kemampuan individu maupun institusi untuk beradaptasi, mempertahankan fungsi utama, dan melakukan transformasi setelah mengalami gangguan akibat bencana. Keempat, Teacher Competency Theory menjelaskan bahwa kompetensi guru tidak hanya meliputi kompetensi pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian, tetapi juga harus berkembang menjadi kompetensi adaptif, kompetensi psikososial, kompetensi kolaboratif, dan kompetensi pembelajaran pada situasi darurat. Integrasi keempat perspektif teori tersebut menjadi dasar konseptual dalam menjelaskan hubungan antara tata kelola pendidikan responsif bencana, kompetensi guru, dan resiliensi pendidikan pada lembaga pendidikan Islam.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana *Disaster-Responsive Governance* dan kompetensi guru berkontribusi dalam membangun educational resilience pada satuan pendidikan Islam pascabencana banjir. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang mengkaji ketiga konsep tersebut secara parsial, penelitian ini menawarkan suatu model konseptual integratif yang menghubungkan tata kelola pendidikan responsif bencana, kompetensi guru adaptif, dan faktor-faktor kontekstual sebagai satu kesatuan dalam membangun sistem pendidikan yang tangguh terhadap bencana. Kebaruan (novelty) penelitian ini terletak pada pengembangan kerangka konseptual yang mengintegrasikan dimensi kebijakan pendidikan, kapasitas guru, dan resiliensi pendidikan dalam konteks pendidikan Islam pascabencana. Model yang dihasilkan diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis terhadap pengembangan kajian kebijakan pendidikan berbasis pengurangan risiko bencana sekaligus menjadi dasar penyusunan kebijakan pendidikan yang lebih adaptif, inklusif, dan berkelanjutan pada daerah-daerah rawan bencana di Indonesia.

II. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus (case study) untuk menganalisis implementasi *Disaster-Responsive Governance* dan kompetensi guru dalam membangun resiliensi pendidikan pada satuan pendidikan Islam pascabencana banjir. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu memberikan

pemahaman yang mendalam terhadap fenomena sosial melalui eksplorasi pengalaman, persepsi, serta interaksi para aktor pendidikan dalam konteks yang nyata (Creswell & Poth, 2018). Sementara itu, desain studi kasus digunakan karena penelitian berfokus pada suatu fenomena kontemporer yang terjadi dalam konteks kehidupan nyata sehingga memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai dinamika tata kelola pendidikan pascabencana (Yin, 2018).

Lokasi penelitian dilaksanakan di Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh, yang merupakan salah satu wilayah dengan tingkat kerawanan banjir tinggi dan mengalami gangguan signifikan terhadap penyelenggaraan pendidikan akibat bencana banjir. Informan penelitian dipilih menggunakan teknik purposive sampling, yaitu teknik pemilihan informan berdasarkan pertimbangan bahwa mereka memiliki pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan langsung terhadap fenomena yang diteliti (Patton, 2015). Informan penelitian terdiri atas kepala madrasah, kepala sekolah, guru Pendidikan Agama Islam, pengawas madrasah, pejabat Dinas Pendidikan, pejabat Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tamiang, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), serta tokoh masyarakat yang berperan dalam proses pemulihan pendidikan pascabencana.

Sumber data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*) dan observasi lapangan terhadap aktivitas pembelajaran serta kondisi satuan pendidikan pascabencana. Adapun data sekunder diperoleh melalui studi dokumentasi berupa laporan BNPB, BPBD, Dinas Pendidikan, Kementerian Agama, dokumen kebijakan pendidikan, laporan rehabilitasi sekolah, serta berbagai artikel ilmiah yang berkaitan dengan tata kelola pendidikan responsif bencana dan kompetensi guru.

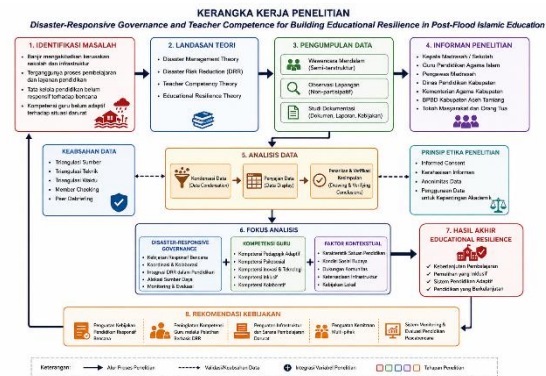
Teknik pengumpulan data dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara semi-terstruktur digunakan untuk menggali informasi mengenai implementasi *Disaster-Responsive Governance*, koordinasi antarlembaga, kompetensi guru, dan strategi pemulihan pembelajaran pascabencana. Observasi dilakukan secara nonpartisipatif untuk memperoleh gambaran empiris mengenai kondisi fisik sekolah, proses pembelajaran, serta kesiapan sarana pendidikan dalam masa pemulihan. Dokumentasi digunakan sebagai sumber data

pendukung untuk memperkuat dan memverifikasi hasil wawancara maupun observasi sehingga meningkatkan kredibilitas temuan penelitian (Creswell & Poth, 2018).

Analisis data menggunakan model analisis interaktif yang dikembangkan oleh Miles, Huberman, dan Saldaña (2014), yang terdiri atas tiga tahapan utama, yaitu kondensasi data (data condensation), penyajian data (data display), dan penarikan serta verifikasi kesimpulan (drawing and verifying conclusions). Pada tahap kondensasi data dilakukan proses seleksi, penyederhanaan, pengkodean (*coding*), serta kategorisasi data sesuai fokus penelitian. Tahap berikutnya adalah penyajian data dalam bentuk matriks tematik untuk mempermudah identifikasi hubungan antar kategori. Selanjutnya, peneliti melakukan interpretasi terhadap seluruh temuan dengan menghubungkannya pada teori Disaster Management, Disaster Risk Reduction (DRR), Teacher Competency Theory, dan Educational Resilience Theory sehingga diperoleh model konseptual mengenai tata kelola pendidikan responsif bencana dalam membangun resiliensi pendidikan.

Keabsahan data dijamin melalui penerapan triangulasi sumber, triangulasi teknik, serta member checking. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai kelompok informan, sedangkan triangulasi teknik dilakukan melalui perbandingan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Selain itu, *member checking* dilakukan dengan meminta konfirmasi kepada beberapa informan utama terhadap hasil interpretasi peneliti guna meningkatkan kredibilitas dan validitas temuan penelitian (Lincoln & Guba, 1985).

Kerangka kerja penelitian menggambarkan tahapan penelitian mulai dari identifikasi masalah hingga penyusunan rekomendasi kebijakan. Kerangka kerja ini disusun berdasarkan pendekatan penelitian kualitatif studi kasus yang mengintegrasikan analisis tata kelola pendidikan responsif bencana, kompetensi guru, serta resiliensi pendidikan.



Gambar 6. Bagan Kerangka Berpikir Penelitian ini

III. HASIL DAN DISKUSI HASIL PENELITIAN

1. Implementasi *Disaster-Responsive Governance* pada Pendidikan Islam Pascabencana Banjir

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi *Disaster-Responsive Governance* pada satuan pendidikan Islam di Kabupaten Aceh Tamiang belum sepenuhnya berjalan secara optimal. Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala madrasah, guru, pengawas madrasah, serta pejabat Dinas Pendidikan dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tamiang, diperoleh informasi bahwa sebagian besar satuan pendidikan belum memiliki sistem tata kelola kebencanaan yang terintegrasi sebelum terjadinya banjir.

Kondisi tersebut terlihat dari belum tersusunnya dokumen rencana kontinjensi sekolah, belum adanya standar operasional prosedur (SOP) pembelajaran pada kondisi darurat, serta masih terbatasnya koordinasi antarlembaga selama proses tanggap darurat berlangsung. Sebagian besar keputusan yang diambil setelah banjir masih bersifat situasional berdasarkan kondisi lapangan, sehingga setiap sekolah menerapkan strategi yang berbeda sesuai dengan kemampuan masing-masing.

Hasil observasi menunjukkan bahwa sekolah yang memiliki koordinasi yang baik dengan pemerintah daerah, BPBD, Kantor Kementerian Agama, serta masyarakat sekitar mampu melaksanakan pemulihan pembelajaran lebih cepat dibandingkan sekolah yang hanya bergantung pada bantuan pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan tata kelola pendidikan pascabencana sangat dipengaruhi oleh efektivitas koordinasi lintas sektor.



Gambar 7. Rapat koordinasi antara Cabang Dinas Pendidikan, kepala sekolah, dan pemangku kepentingan dalam merumuskan strategi percepatan pemulihan sekolah terdampak banjir di Kabupaten Aceh Tamiang. Kegiatan ini merupakan implementasi *Disaster-Responsive Governance* melalui koordinasi lintas sektor dalam mempercepat rehabilitasi sarana pendidikan dan keberlangsungan proses pembelajaran.

Selain itu, penelitian menemukan bahwa prinsip *Disaster Risk Reduction (DRR)* belum sepenuhnya diintegrasikan ke dalam kebijakan sekolah. Program mitigasi bencana masih bersifat insidental dan lebih banyak dilakukan setelah terjadinya bencana daripada sebagai bagian dari upaya kesiapsiagaan sekolah. Akibatnya, sebagian besar sekolah mengalami kesulitan dalam menyusun strategi pemulihan pembelajaran secara cepat dan sistematis.

2. Kompetensi Guru dalam Penyelenggaraan Pendidikan Islam Pascabencana

Temuan penelitian menunjukkan bahwa guru memiliki peran yang jauh lebih kompleks dibandingkan kondisi pembelajaran normal. Selain bertanggung jawab melaksanakan proses pembelajaran, guru juga menjalankan fungsi sebagai pendamping psikososial, fasilitator pemulihan pembelajaran, mediator komunikasi antara sekolah dan orang tua, serta penguat nilai-nilai spiritual peserta didik.

Berdasarkan hasil wawancara, hampir seluruh guru menyatakan bahwa mereka belum pernah memperoleh pelatihan khusus mengenai pembelajaran pada situasi bencana. Kompetensi yang dimiliki selama ini lebih banyak diperoleh melalui pengalaman lapangan dibandingkan program pengembangan profesional yang terstruktur.

Dalam pelaksanaan pembelajaran, guru melakukan berbagai bentuk adaptasi, antara lain penggunaan ruang belajar sementara, penyederhanaan materi pembelajaran, pengelompokan peserta didik berdasarkan kondisi

psikologis, serta pemanfaatan media pembelajaran sederhana yang tersedia di lingkungan sekitar.



Gambar 8. Monitoring kondisi sekolah oleh pemerintah daerah dan instansi terkait sebagai bagian dari evaluasi kebutuhan rehabilitasi sarana pendidikan serta penyusunan kebijakan pemulihan pendidikan pascabencana. Kegiatan monitoring merupakan salah satu bentuk implementasi tata kelola pendidikan yang responsif terhadap bencana

Hasil observasi juga menunjukkan bahwa guru Pendidikan Agama Islam memiliki kontribusi yang cukup besar dalam proses pemulihan psikologis peserta didik. Guru secara aktif mengintegrasikan nilai-nilai keislaman seperti kesabaran (*ṣabr*), tawakal, ukhuwah, dan kepedulian sosial ke dalam kegiatan pembelajaran sehingga membantu peserta didik mengurangi kecemasan pascabencana.

Namun demikian, penelitian juga menemukan beberapa kendala yang dihadapi guru, yaitu:

- 1) keterbatasan media pembelajaran;
- 2) belum adanya modul pembelajaran darurat;
- 3) rendahnya kompetensi psikososial;
- 4) belum tersedianya pelatihan pembelajaran berbasis kebencanaan;
- 5) terbatasnya dukungan teknologi pembelajaran.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa kompetensi guru pada kondisi bencana tidak lagi hanya mencakup kompetensi pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian, tetapi juga memerlukan kompetensi adaptif, kompetensi kolaboratif, kompetensi psikososial, serta kompetensi mitigasi bencana.

3. Faktor Kontekstual yang Mempengaruhi Resiliensi Pendidikan

Penelitian menemukan bahwa resiliensi pendidikan tidak hanya dipengaruhi oleh tata kelola pendidikan dan kompetensi guru, tetapi juga oleh berbagai faktor kontekstual yang berkembang selama masa pemulihan.

Faktor pertama adalah tingkat keparahan bencana. Sekolah yang mengalami kerusakan ringan mampu memulai kembali proses pembelajaran

dalam waktu relatif singkat, sedangkan sekolah dengan tingkat kerusakan berat memerlukan waktu yang lebih lama karena keterbatasan sarana pembelajaran.



Gambar 9. Kerusakan infrastruktur jalan, lingkungan permukiman, dan akses transportasi di Kabupaten Aceh Tamiang pascabanjir yang menjadi salah satu faktor penghambat distribusi bantuan pendidikan dan pemulihan aktivitas belajar mengajar.

Faktor kedua adalah kondisi geografis. Sekolah yang berada pada wilayah pedalaman mengalami hambatan lebih besar akibat rusaknya akses transportasi sehingga distribusi bantuan pendidikan menjadi lebih lambat dibandingkan sekolah yang berada di wilayah perkotaan.



Gambar 10. Kegiatan gotong royong yang melibatkan relawan, guru, masyarakat, dan aparat dalam membersihkan sekolah terdampak banjir sebagai bentuk kolaborasi sosial untuk mempercepat pemulihan pendidikan di Kabupaten Aceh Tamiang.

Faktor ketiga adalah dukungan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan komite sekolah, tokoh agama, orang tua peserta didik, dan organisasi sosial memberikan kontribusi yang signifikan terhadap percepatan pemulihan pembelajaran. Sekolah yang memperoleh dukungan masyarakat secara aktif mampu menyelenggarakan kegiatan belajar melalui pemanfaatan masjid, balai desa, maupun fasilitas umum lainnya sebagai ruang belajar sementara.



Gambar 11. Aktivitas peserta didik yang kembali mengikuti pembelajaran setelah proses pembersihan sekolah, mencerminkan awal pemulihan layanan pendidikan dan penguatan *educational resilience* pascabencana.

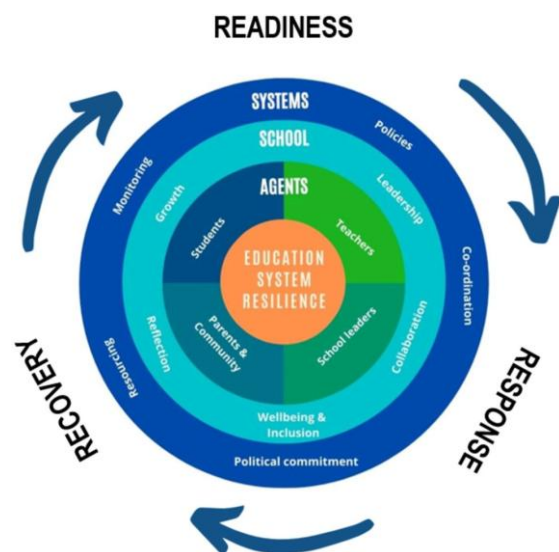
Selain itu, penelitian juga menemukan bahwa dukungan pemerintah daerah melalui penyediaan bantuan sarana pendidikan, rehabilitasi sekolah, dan pendampingan guru turut menentukan keberhasilan proses pemulihan pendidikan.

4. Model Integrasi *Disaster-Responsive Governance* dan Kompetensi Guru dalam Membangun *Educational Resilience*

Berdasarkan hasil analisis data, penelitian menghasilkan suatu model konseptual mengenai pembangunan *educational resilience* pada pendidikan Islam pascabencana banjir.

Model tersebut menunjukkan bahwa *educational resilience* dibangun melalui interaksi tiga komponen utama, yaitu:

1. *Disaster-Responsive Governance*, yang meliputi kebijakan responsif bencana, koordinasi lintas sektor, integrasi *Disaster Risk Reduction*, alokasi sumber daya, serta monitoring dan evaluasi.



Gambar 12. Framework Education System Resilience yang menunjukkan hubungan antara kebijakan, kepemimpinan, guru, komunitas, dan sistem pendidikan dalam membangun resiliensi

pendidikan. Adaptasi dari Global Partnership for Education (2024)

2. Kompetensi Guru Adaptif, yang meliputi kompetensi pedagogik adaptif, kompetensi psikososial, kompetensi pembelajaran inklusif, kompetensi kolaboratif, serta kemampuan mengintegrasikan nilai-nilai keislaman dalam proses pemulihan pembelajaran.



Gambar 13. Framework ini merupakan standar internasional mengenai sekolah tangguh bencana.

3. Faktor Kontekstual, yang meliputi tingkat kerusakan sekolah, karakteristik wilayah, dukungan masyarakat, ketersediaan infrastruktur, serta kebijakan pemerintah daerah.

Ketiga komponen tersebut saling berinteraksi membentuk Educational Resilience, yang ditandai oleh:

- 1) keberlangsungan proses pembelajaran (*learning continuity*);
- 2) pemulihan pendidikan yang inklusif (*inclusive recovery*);
- 3) sistem pendidikan yang adaptif terhadap bencana;
- 4) peningkatan kapasitas sekolah dalam menghadapi bencana di masa mendatang.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan membangun resiliensi pendidikan tidak hanya bergantung pada kualitas kebijakan pemerintah, tetapi juga pada kemampuan guru dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut secara adaptif sesuai kondisi lapangan.

Dengan demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa *Disaster-Responsive Governance*, kompetensi guru adaptif, dan faktor kontekstual merupakan tiga komponen yang saling berkaitan dalam membangun resiliensi pendidikan pada satuan pendidikan Islam pascabencana banjir. Ketika salah satu komponen belum berjalan secara optimal, proses pemulihan pendidikan menjadi lebih lambat dan kurang efektif. Sebaliknya, integrasi yang kuat antara tata kelola pendidikan yang responsif, kompetensi guru yang adaptif, serta

dukungan lingkungan mampu mempercepat pemulihan pembelajaran dan meningkatkan ketahanan sistem pendidikan dalam menghadapi bencana.

DISKUSI

1. *Disaster-Responsive Governance* sebagai Fondasi Resiliensi Pendidikan Pascabencana

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi *Disaster-Responsive Governance* memiliki peranan yang sangat menentukan dalam menjaga keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan Islam pascabencana banjir. Temuan ini memperlihatkan bahwa gangguan terhadap proses pembelajaran tidak semata-mata disebabkan oleh kerusakan fisik sekolah akibat banjir, melainkan juga dipengaruhi oleh kapasitas tata kelola pendidikan dalam mengantisipasi, merespons, dan memulihkan sistem pendidikan secara cepat dan terkoordinasi. Sekolah yang memiliki koordinasi lebih baik dengan pemerintah daerah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Kantor Kementerian Agama, dan masyarakat mampu melaksanakan proses pemulihan pembelajaran lebih cepat dibandingkan sekolah yang memiliki koordinasi kelembagaan yang terbatas.

Temuan tersebut memperkuat pandangan Disaster Management Theory yang menempatkan tata kelola sebagai komponen utama dalam siklus mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan pemulihan bencana. Tata kelola yang responsif memungkinkan lembaga pendidikan melakukan pengambilan keputusan secara cepat berdasarkan kondisi lapangan sehingga proses pembelajaran tetap dapat berlangsung meskipun berada pada situasi krisis. Sebaliknya, tata kelola yang masih bersifat administratif dan reaktif menyebabkan proses rehabilitasi pendidikan berjalan lambat karena setiap keputusan harus menunggu instruksi dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Lassa et al. (2023) yang menyatakan bahwa efektivitas tata kelola bencana ditentukan oleh koordinasi kelembagaan, kapasitas organisasi, serta integrasi kebijakan lintas sektor. Demikian pula Shah et al. (2020) menjelaskan bahwa keberhasilan sekolah dalam menghadapi bencana sangat dipengaruhi oleh kesiapan organisasi melalui penyusunan rencana kontinjensi, standar operasional prosedur, dan sistem koordinasi yang terintegrasi.

Namun demikian, penelitian ini menemukan dimensi baru yang belum banyak dibahas pada penelitian sebelumnya. Tata kelola pendidikan yang responsif tidak cukup hanya diwujudkan melalui penyusunan kebijakan formal, tetapi juga harus dibangun melalui *governance collaboration*, yaitu kolaborasi yang melibatkan pemerintah, lembaga

pendidikan, organisasi kemasyarakatan, tokoh agama, serta masyarakat lokal secara simultan. Dalam konteks pendidikan Islam, keberadaan tokoh agama dan masyarakat menjadi bagian penting dari proses pemulihan pendidikan karena mampu mempercepat mobilisasi sumber daya, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sekolah, serta memperkuat nilai-nilai solidaritas sosial selama masa pemulihan.

Temuan ini memperluas konsep *Disaster-Responsive Governance* yang selama ini lebih banyak dipahami sebagai tata kelola administratif menuju tata kelola kolaboratif (*collaborative disaster governance*) yang menempatkan masyarakat sebagai bagian integral dari sistem pendidikan pascabencana.

2. Transformasi Kompetensi Guru pada Pendidikan Islam Pascabencana

Temuan penelitian menunjukkan bahwa bencana telah mengubah ruang lingkup kompetensi guru secara signifikan. Guru tidak lagi hanya menjalankan fungsi sebagai pendidik yang menyampaikan materi pembelajaran, tetapi berkembang menjadi fasilitator pemulihan pendidikan, pendamping psikososial, mediator komunikasi antara sekolah dan keluarga, serta agen penguatan nilai-nilai spiritual bagi peserta didik yang terdampak bencana.

Perubahan peran tersebut menunjukkan bahwa kompetensi guru pada situasi bencana bersifat multidimensional. Selain kompetensi pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian sebagaimana diatur dalam kebijakan nasional, guru juga memerlukan kompetensi adaptif, kompetensi kolaboratif, kompetensi psikososial, serta kemampuan melakukan pembelajaran darurat sesuai kondisi lapangan.

Temuan ini memperkuat *Teacher Competency Theory* yang menyatakan bahwa kompetensi guru merupakan seperangkat kemampuan yang terus berkembang mengikuti perubahan lingkungan pendidikan. Pada kondisi bencana, guru dituntut mampu mengambil keputusan pembelajaran secara fleksibel, mengembangkan media pembelajaran sederhana, membangun komunikasi dengan orang tua, serta memberikan dukungan emosional kepada peserta didik yang mengalami trauma.

Penelitian Arif et al. (2025) menunjukkan bahwa kemampuan adaptasi guru menjadi faktor utama dalam menjaga keberlangsungan pembelajaran pada situasi krisis. Hasil serupa juga ditemukan oleh Parrott et al. (2025) yang menjelaskan bahwa guru memiliki fungsi ganda sebagai pendidik sekaligus penyedia layanan psikososial selama proses pemulihan pascabencana.

Namun demikian, penelitian ini menemukan bahwa pada konteks pendidikan Islam terdapat dimensi tambahan yang belum banyak dijelaskan

dalam penelitian terdahulu, yaitu kompetensi spiritual. Guru Pendidikan Agama Islam secara aktif mengintegrasikan nilai-nilai keislaman seperti *ṣabr* (kesabaran), *tawakkal*, *ukhuwah*, *ta'āwun*, dan kepedulian sosial dalam proses pembelajaran sehingga membantu peserta didik membangun optimisme dan ketahanan psikologis setelah mengalami bencana.

Dengan demikian, kompetensi guru pada pendidikan Islam pascabencana tidak hanya berorientasi pada aspek akademik, tetapi juga pada penguatan karakter religius sebagai bagian dari proses membangun resiliensi peserta didik.

3. Educational Resilience sebagai Hasil Integrasi Tata Kelola dan Kompetensi Guru

Temuan penelitian menunjukkan bahwa resiliensi pendidikan merupakan hasil dari interaksi antara tata kelola pendidikan yang responsif, kompetensi guru yang adaptif, dan berbagai faktor kontekstual yang berkembang selama masa pemulihan. Resiliensi pendidikan tidak hanya dimaknai sebagai kemampuan sekolah membuka kembali proses pembelajaran, tetapi juga sebagai kemampuan sistem pendidikan mempertahankan kualitas layanan pendidikan, menjamin akses belajar bagi seluruh peserta didik, serta meningkatkan kapasitas kelembagaan dalam menghadapi bencana berikutnya.

Temuan ini sejalan dengan *Resilience Theory* yang memandang resiliensi sebagai kemampuan suatu sistem untuk beradaptasi terhadap gangguan, mempertahankan fungsi utamanya, dan melakukan transformasi menuju kondisi yang lebih baik setelah mengalami krisis. Dalam konteks pendidikan, resiliensi bukan sekadar proses pemulihan (*recovery*), tetapi juga proses pembelajaran kelembagaan (*organizational learning*) yang menghasilkan perubahan sistemik menuju pendidikan yang lebih adaptif.

Penelitian Roca-Campos et al. (2025) menjelaskan bahwa resiliensi pendidikan harus dibangun melalui pendekatan inklusif yang menjamin keberlangsungan layanan pendidikan bagi seluruh peserta didik, termasuk kelompok rentan dan peserta didik berkebutuhan khusus. Temuan penelitian ini mendukung pandangan tersebut, namun memperlihatkan bahwa keberhasilan pendidikan inklusif juga dipengaruhi oleh kesiapan guru dan efektivitas tata kelola sekolah dalam mengalokasikan sumber daya secara adil.

Selain itu, penelitian ini menunjukkan bahwa faktor-faktor kontekstual seperti kondisi geografis, tingkat kerusakan sekolah, dukungan masyarakat, karakteristik sosial budaya, serta kebijakan pemerintah daerah turut menentukan tingkat resiliensi pendidikan. Artinya, tidak terdapat satu model pemulihan pendidikan yang dapat diterapkan secara seragam pada seluruh wilayah terdampak

bencana. Setiap daerah memerlukan strategi pemulihan yang disesuaikan dengan kondisi lokal.

Temuan tersebut memperkuat paradigma bahwa pembangunan resiliensi pendidikan harus dilakukan melalui pendekatan berbasis konteks (*context-sensitive educational resilience*), bukan sekadar melalui pendekatan administratif yang bersifat seragam.

4. Kontribusi Konseptual dan Implikasi Kebijakan

Kontribusi utama penelitian ini adalah pengembangan model konseptual yang mengintegrasikan *Disaster-Responsive Governance*, Teacher Competence, Contextual Factors, dan Educational Resilience dalam satu kerangka yang saling berkaitan. Berbeda dengan penelitian terdahulu yang cenderung membahas masing-masing konsep secara terpisah, penelitian ini menunjukkan bahwa ketiga komponen tersebut membentuk hubungan yang bersifat dinamis dan saling memengaruhi dalam membangun sistem pendidikan yang tangguh terhadap bencana.

Model yang dikembangkan menunjukkan bahwa tata kelola pendidikan yang responsif menjadi faktor pendorong utama dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang adaptif. Tata kelola tersebut kemudian memperkuat kapasitas guru melalui penyediaan kebijakan, pelatihan, koordinasi, serta dukungan sumber daya sehingga guru mampu melaksanakan pembelajaran adaptif pada situasi darurat. Selanjutnya, interaksi antara tata kelola dan kompetensi guru akan menghasilkan resiliensi pendidikan yang ditandai oleh keberlangsungan pembelajaran, pemulihan yang inklusif, peningkatan kapasitas kelembagaan, serta kesiapsiagaan menghadapi bencana di masa mendatang.

Dari perspektif kebijakan pendidikan, hasil penelitian ini memberikan beberapa implikasi penting. Pertama, pemerintah perlu mengintegrasikan prinsip Disaster Risk Reduction (DRR) ke dalam seluruh kebijakan pendidikan, mulai dari perencanaan, implementasi, hingga evaluasi program pendidikan. Kedua, pengembangan kompetensi guru perlu diperluas melalui pelatihan mengenai pembelajaran darurat, pendampingan psikososial, pendidikan inklusif, serta mitigasi bencana berbasis sekolah. Ketiga, pemerintah daerah perlu memperkuat koordinasi lintas sektor dengan melibatkan BPBD, Dinas Pendidikan, Kantor Kementerian Agama, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, dan komunitas lokal dalam membangun sistem pendidikan yang adaptif terhadap bencana. Keempat, satuan pendidikan perlu menyusun rencana kontinjensi, standar operasional prosedur pembelajaran darurat, serta mekanisme evaluasi berkala sebagai bagian dari penguatan tata kelola pendidikan responsif bencana.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori mengenai resiliensi pendidikan, tetapi juga menawarkan kerangka kebijakan yang dapat dijadikan acuan dalam merancang sistem pendidikan Islam yang lebih adaptif, inklusif, dan berkelanjutan di wilayah rawan bencana.

Dibandingkan penelitian terdahulu, kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada pengembangan Model Integratif Educational Resilience yang menghubungkan empat komponen utama, yaitu:

- *Disaster-Responsive Governance* sebagai dimensi makro kebijakan dan tata kelola;
- *Adaptive Teacher Competence* sebagai dimensi mikro implementasi pembelajaran;
- *Contextual Factors* sebagai faktor moderator yang memengaruhi efektivitas implementasi;
- *Educational Resilience* sebagai luaran sistem pendidikan yang adaptif, inklusif, dan berkelanjutan.

Model ini memperluas kajian kebijakan pendidikan dengan menunjukkan bahwa resiliensi pendidikan tidak hanya bergantung pada kualitas kebijakan atau kapasitas guru secara terpisah, tetapi dibentuk oleh interaksi dinamis antara tata kelola, kompetensi guru, dan konteks lokal. Temuan ini memberikan kontribusi konseptual yang relevan bagi pengembangan teori kebijakan pendidikan berbasis pengurangan risiko bencana serta menjadi dasar bagi penyusunan kebijakan pendidikan Islam di wilayah yang rentan terhadap bencana.

IV. KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa *Disaster-Responsive Governance* dan kompetensi guru merupakan dua komponen utama yang saling berkaitan dalam membangun educational resilience pada satuan pendidikan Islam pascabencana banjir. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa gangguan terhadap penyelenggaraan pendidikan tidak hanya dipengaruhi oleh tingkat kerusakan infrastruktur akibat bencana, tetapi juga ditentukan oleh kapasitas tata kelola pendidikan dalam merespons situasi darurat secara cepat, adaptif, kolaboratif, dan berkelanjutan. Implementasi tata kelola pendidikan yang responsif terhadap bencana masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain belum optimalnya integrasi *Disaster Risk Reduction* (DRR) dalam kebijakan pendidikan, terbatasnya koordinasi antarlembaga, serta belum tersusunnya mekanisme operasional yang mampu menjamin keberlangsungan pembelajaran pada kondisi darurat.

Penelitian ini juga menemukan bahwa peran guru mengalami transformasi yang signifikan pada

situasi pascabencana. Guru tidak lagi hanya berfungsi sebagai pelaksana pembelajaran, tetapi juga berperan sebagai fasilitator pembelajaran adaptif, pendamping psikososial, mediator komunikasi antara sekolah dan masyarakat, serta penguat nilai-nilai spiritual peserta didik. Dengan demikian, kompetensi guru pada konteks pendidikan Islam pascabencana perlu dipahami sebagai kompetensi multidimensional yang mencakup kompetensi pedagogik, profesional, sosial, adaptif, psikososial, kolaboratif, dan spiritual. Penguatan kompetensi tersebut menjadi prasyarat penting dalam menjaga keberlangsungan proses pembelajaran sekaligus mendukung pemulihan kondisi psikologis peserta didik.

Temuan penelitian selanjutnya menunjukkan bahwa resiliensi pendidikan tidak dibangun hanya melalui kebijakan pendidikan ataupun kapasitas guru secara terpisah, melainkan merupakan hasil interaksi antara *Disaster-Responsive Governance*, kompetensi guru adaptif, dan faktor-faktor kontekstual, seperti tingkat keparahan bencana, kondisi geografis, dukungan masyarakat, ketersediaan infrastruktur, serta kebijakan pemerintah daerah. Interaksi ketiga komponen tersebut membentuk sistem pendidikan yang mampu mempertahankan keberlangsungan pembelajaran, mempercepat pemulihan pendidikan secara inklusif, meningkatkan kapasitas kelembagaan, serta memperkuat kesiapsiagaan sekolah dalam menghadapi bencana pada masa mendatang.

Kontribusi utama penelitian ini adalah pengembangan Model Integratif Educational Resilience yang menghubungkan *Disaster-Responsive Governance*, kompetensi guru adaptif, dan faktor kontekstual sebagai satu kesatuan dalam membangun sistem pendidikan Islam yang tangguh terhadap bencana. Model ini memperluas kajian kebijakan pendidikan dengan menunjukkan bahwa keberhasilan pembangunan resiliensi pendidikan sangat bergantung pada sinergi antara tata kelola yang responsif, kapasitas sumber daya manusia, dan dukungan lingkungan sosial. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi konseptual terhadap pengembangan teori kebijakan pendidikan berbasis pengurangan risiko bencana sekaligus memberikan dasar empiris bagi penyusunan kebijakan pendidikan yang lebih adaptif, inklusif, dan berkelanjutan pada wilayah-wilayah yang memiliki tingkat kerawanan bencana tinggi.

Dari perspektif kebijakan, hasil penelitian ini menegaskan perlunya pemerintah mengintegrasikan

prinsip Disaster Risk Reduction (DRR) ke dalam kebijakan pendidikan nasional maupun daerah, memperkuat sistem koordinasi lintas sektor, menyusun standar operasional pembelajaran darurat, serta mengembangkan program peningkatan kompetensi guru berbasis kebencanaan secara berkelanjutan. Selain itu, penguatan kemitraan antara pemerintah, satuan pendidikan, masyarakat, organisasi kemanusiaan, dan lembaga keagamaan perlu menjadi bagian dari strategi pembangunan sistem pendidikan yang lebih resilien. Melalui langkah tersebut, pendidikan Islam tidak hanya mampu mempertahankan keberlangsungan layanan pendidikan ketika terjadi bencana, tetapi juga mampu menjadi institusi yang berperan aktif dalam membangun ketahanan sosial dan mempercepat proses pemulihan masyarakat pascabencana.

V. REKOMENDASI

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan, dan kesimpulan, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan kebijakan maupun praktik penyelenggaraan pendidikan Islam di wilayah rawan bencana.

Pertama, pemerintah pusat, khususnya Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta Kementerian Agama Republik Indonesia, perlu mengintegrasikan prinsip Disaster Risk Reduction (DRR) ke dalam kebijakan pendidikan nasional secara lebih sistematis. Integrasi tersebut tidak hanya difokuskan pada penyediaan infrastruktur pendidikan yang aman terhadap bencana, tetapi juga mencakup penyusunan standar operasional prosedur (SOP) pembelajaran darurat, pengembangan kurikulum pendidikan kebencanaan, serta penyusunan pedoman tata kelola pendidikan yang responsif terhadap berbagai jenis bencana. Kebijakan tersebut perlu menjadi bagian dari sistem penjaminan mutu pendidikan sehingga setiap satuan pendidikan memiliki kesiapsiagaan yang memadai dalam menghadapi situasi darurat.

Kedua, pemerintah daerah, melalui Dinas Pendidikan, Kantor Kementerian Agama, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), perlu memperkuat koordinasi lintas sektor dalam penyelenggaraan pendidikan pascabencana. Koordinasi tersebut hendaknya diwujudkan dalam bentuk penyusunan rencana kontinjensi pendidikan, pembentukan satuan tugas pendidikan tanggap bencana, pengembangan sistem informasi pendidikan kebencanaan, serta pelaksanaan simulasi bencana secara berkala di lingkungan sekolah dan madrasah. Sinergi antarlembaga akan meningkatkan efektivitas proses pemulihan pendidikan sekaligus

mempercepat distribusi bantuan kepada satuan pendidikan yang terdampak.

Ketiga, satuan pendidikan Islam perlu mengembangkan sistem tata kelola internal yang lebih adaptif melalui penyusunan kebijakan sekolah tangguh bencana (*disaster-resilient school*). Setiap sekolah dan madrasah diharapkan memiliki dokumen mitigasi bencana, prosedur pembelajaran darurat, mekanisme komunikasi krisis, serta sistem evaluasi yang mampu menjamin keberlangsungan proses pembelajaran meskipun berada dalam kondisi darurat. Selain itu, penguatan kemitraan dengan komite sekolah, tokoh agama, organisasi kemasyarakatan, dan lembaga kemanusiaan perlu terus ditingkatkan sebagai bagian dari strategi membangun resiliensi pendidikan berbasis komunitas.

Keempat, pengembangan kompetensi guru perlu diarahkan pada pembentukan kompetensi adaptif berbasis kebencanaan. Program pendidikan dan pelatihan guru tidak hanya berorientasi pada peningkatan kompetensi pedagogik dan profesional, tetapi juga harus mencakup pelatihan mengenai pembelajaran pada situasi darurat, dukungan psikososial, pendidikan inklusif pascabencana, komunikasi krisis, pemanfaatan teknologi pembelajaran darurat, serta strategi integrasi nilai-nilai keislaman dalam proses pemulihan psikologis peserta didik. Dengan demikian, guru memiliki kapasitas yang lebih baik dalam mempertahankan keberlangsungan pembelajaran sekaligus mendukung pemulihan kondisi sosial dan emosional peserta didik.

Kelima, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa resiliensi pendidikan dibangun melalui interaksi antara *Disaster-Responsive Governance*, kompetensi guru, dan faktor-faktor kontekstual. Oleh karena itu, pemerintah dan lembaga pendidikan perlu mengembangkan Model Integratif Educational Resilience sebagai acuan dalam penyusunan kebijakan pendidikan di daerah rawan bencana. Model tersebut dapat dijadikan dasar dalam merancang program peningkatan kapasitas kelembagaan, sistem koordinasi lintas sektor, pengembangan sumber daya manusia, serta penguatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan yang adaptif dan berkelanjutan.

Keenam, bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini masih memiliki keterbatasan karena menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kasus pada satu wilayah penelitian, sehingga temuan yang dihasilkan belum dapat digeneralisasikan secara luas. Oleh karena itu, penelitian berikutnya disarankan menggunakan pendekatan mixed methods atau kuantitatif untuk menguji hubungan antara *Disaster-Responsive Governance*, kompetensi guru, dan *educational resilience* pada berbagai jenjang pendidikan maupun wilayah yang

memiliki karakteristik kebencanaan yang berbeda. Selain itu, penelitian mendatang juga dapat mengembangkan model pengukuran (*measurement model*) terhadap tingkat resiliensi pendidikan sehingga diperoleh instrumen yang dapat digunakan sebagai dasar evaluasi kebijakan pendidikan berbasis pengurangan risiko bencana.

Dengan demikian, rekomendasi penelitian ini menegaskan bahwa pembangunan resiliensi pendidikan tidak dapat dilakukan melalui pendekatan sektoral semata, melainkan memerlukan kolaborasi yang berkelanjutan antara pemerintah, satuan pendidikan, guru, masyarakat, lembaga keagamaan, organisasi kemanusiaan, dan dunia akademik. Melalui sinergi tersebut, sistem pendidikan Islam di Indonesia diharapkan mampu menjadi institusi yang tidak hanya bertahan ketika menghadapi bencana, tetapi juga memiliki kapasitas untuk beradaptasi, pulih, dan berkembang menjadi sistem pendidikan yang lebih inklusif, tangguh, dan berkelanjutan.

VI. REFERENSI

- Arif, M., Suryadi, B., & Rahman, A. (2025). Teacher resilience and adaptive strategies in post-disaster education settings. *International Journal of Educational Development*, 98, 102742.
- Braun, V., & Clarke, V. (2021). *Thematic analysis: A practical guide*. SAGE Publications.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Halim, A. (2024). Teacher competence in Islamic education: Integrating pedagogical and moral dimensions. *Journal of Islamic Education Studies*, 12(2), 145–162.
- Is, M., & Karadas, H. (2025). Educational leadership in crisis: Managing schools in disaster contexts. *Educational Management Administration & Leadership*, 53(1), 85–102.
- Lassa, J., Setiawan, B., & Nugroho, A. (2023). Disaster risk governance in Indonesia: Challenges and opportunities. *International Journal of Disaster Risk Science*, 14(3), 321–335.
- Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). *Naturalistic inquiry*. SAGE Publications.
- Manuel, A. R., Arias, E., Orfrecio, M., Martinez, N., Java, V., Java, M., Janito, C., & Tagare, R. (2025). Enhancing disaster and emergency preparedness in schools: An examination of management knowledge and practices among elementary educators. *Journal of Social Knowledge Education*, 6(2), 231–241. <https://doi.org/10.37251/jske.v6i2.1653>

- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Oda, T., & Ichinose, T. (2025). Enhancing disaster risk reduction competencies among pre-service teachers through disaster risk reduction education certification. *Journal of Hazard Literacy*, 1(2), 21–39.
- Opabola, O., & Galasso, E. (2024). The impact of disasters on education outcomes: Evidence from developing countries. *World Development*, 172, 106417.
- Opabola, O., Adeyemi, A., & Ibrahim, R. (2023). Infrastructure damage and educational disruption in disaster contexts. *International Journal of Disaster Risk Reduction*, 89, 103456.
- Parrott, A., Mitchell, J., & Brown, L. (2025). Psychosocial support and trauma-informed teaching in post-disaster education. *Teaching and Teacher Education*, 132, 104252.
- Patton, M. Q. (2015). *Qualitative research & evaluation methods: Integrating theory and practice* (4th ed.). SAGE Publications.
- Roca-Campos, E., Martinez, P., & Gomez, R. (2025). Inclusive education in disaster recovery: Addressing vulnerability and inequality. *International Journal of Inclusive Education*, 29(1), 55–72.
- Rofiah, N. H., Kawai, N., & Hayati, E. N. (2021). Key elements of disaster mitigation education in inclusive school setting in the Indonesian context. *Jambá: Journal of Disaster Risk Studies*, 13(1), a1159. <https://doi.org/10.4102/jamba.v13i1.1159>
- Samsiyah, I. F. (2026). Examining the implementation of disaster risk reduction education for students with disabilities in inclusive schools. *Journal of Elementary and Special Education*.
- Shah, A., Khan, R., & Ali, S. (2020). School disaster preparedness and management: A case study approach. *International Journal of Disaster Risk Reduction*, 47, 101545.
- UNESCO. (2023). *Global education monitoring report 2023*. UNESCO Publishing.
- United Nations Office for Disaster Risk Reduction. (2023). *Global assessment report on disaster risk reduction 2023*. UNDRR.
- UNICEF. (2024). *Learning interrupted: The impact of climate-related disasters on children's education*. UNICEF.
- Yin, R. K. (2018). *Case study research and applications: Design and methods* (6th ed.). SAGE Publications.
- Zhong, S., Clark, M., Hou, X., & Zhang, Y. (2021). Disaster education and risk awareness among students: A systematic review. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 18(6), 3032.